

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PILADANG, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT

Silvia Marlina¹, Junaidi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Sumatera Barat

¹silviamarlina337@gmail.com✉, ²junaidi.alhadi@gmail.com✉



ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pertama wawancara kepada 1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 1 tenaga keuangan, 1 tenaga administrasi, 2 guru dan 2 siswa; kedua dokumentasi; dan ketiga observasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) perencanaan pembiayaan dengan merencanakan biaya penerimaan siswa baru, pengembangan pendidikan dan kontribusi masyarakat. (2) penggunaan biaya untuk infrastruktur, gaji tenaga pendidik dan kependidikan, alat tulis kantor dan operasional madrasah lainnya. (3) pengawasan pembiayaan: pertama oleh Yayasan dengan mengecek rekening madrasah, kedua oleh kepala sekolah dengan mengecek bukti pengeluaran keuangan sekolah. (4) pelaporan dan pertanggungjawab dengan membuat laporan keuangan madrasah yang dilaporkan kepada kepala sekolah dan yayasan setiap semester.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pembiayaan, Madrasah, Pendidikan



ABSTRACT

The aim of the study was to analyze and describe the educational financing management model in Piladang Private Madrasah Ibtidiiyah. Qualitative research methods with a case study approach. The first data collection technique was interviewing 1 school principal, 1 vice principal, 1 finance staff, 1 administrative staff, 2 teachers, and 2 students; second run; and third observation. Data processing techniques with reduction, data presentation, and conclusion. Data validation technique with technique and source triangulation. The results of the study show: (1) financing planning by planning the costs of admitting new students, educational development, and community contributions. (2) use of costs for infrastructure, salaries of teaching and educational staff, office stationery, and other madrasah operations. (3) financing supervision: firstly by the Foundation by checking the school's account, secondly by the school principal by checking proof of school financial expenses. (4) reporting and accountability by making madrasah financial reports which are reported to school principals and foundations every semester.

Keywords: *Management, Funding, Madrasah, Education*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pengelolaan pembiayaan pendidikan sangatlah tidak mudah dalam pengaturannya. Karena pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab penuh organisasi dan pemimpinnya utamanya dalam pemanfaatannya. Pada negara yang berkembang, pengelolaan pembiayaan pendidikan lebih menekankan pada proses pengembangan pendidikan dalam segala aspek yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Maka dari itu, kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan juga lembaga pendidikan sangatlah penting utamanya dalam masalah jumlah dana yang harus diterima sekolah yang mana dana tersebut digunakan untuk kepentingan mutu proses pendidikan dan tidak termasuk honor. Agar strategi ini dapat diwujudkan, para pemimpin politik dan pelaku pendidikan harus bersungguh-sungguh membangun sistem pendidikan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak kemakmuran daerah. Banyak daerah yang masih belum mampu menjalankan misi hukum, dan lembaga pendidikan tetap beroperasi seperti biasa. Pengelolaan terhadap Lembaga pendidikan bertujuan untuk menata dan menertibkan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah hingga sekolah tersebut mencapai apa yang hendak dicapai dalam visi dan misi yang telah disusunnya (Baidowi & Widyaningsih, 2022).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan memerlukan ide dan kerangka perencanaan yang dikembangkan untuk mengembangkan sistem pembiayaan nasional yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dana di tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi hal yang sangat penting keberadaannya karena jika tidak dikelola dengan baik, maka pendanaan bisa menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pembuat kebijakan pembiayaan pendidikan adalah satu (Safriadi, 2016; Sudarmono et al., 2021). Salah satu variabel pendukung pencapaian pendidikan tanpa uang, kegiatan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan memulai suatu kegiatan pun akan sulit. Pembiayaan bukan satu-satunya ukuran kemajuan atau keberhasilan, ketersediaan dana pendidikan merupakan salah satu indikator komitmen penyelenggara pendidikan untuk menjalankan lembaga pendidikan dengan sukses dan efisien (Amien et al., 2021; Ferdi, 2013).

Pembiayaan sekolah tentunya memiliki model-model yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan. Akibatnya, itu berfungsi sebagai referensi atau landasan bagi manajer untuk melaksanakan operasi instruksional dari suatu lembaga pendidikan (Yunita et al., 2022). Model pembiayaan yang diadopsi akan mempengaruhi arah kebijakan pengelola pendidikan. Semakin bijak memilih model, maka semakin cerdas pula dalam menilai dan memutuskan fase pertumbuhan pendidikan. Kalaupun diperhatikan, tidak hanya ada satu model pendanaan; hampir semua negara memiliki varian yang signifikan dalam model keuangan sekolah. Ada pemerintah yang hanya bertanggung jawab mendanai pendidikan, lalu ada negara yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mendanai pendidikan. Intinya, bentuk model – model yang telah berkembang akan

menentukan jalur pertumbuhan dalam pengelolaan pola pembiayaan di lembaga pendidikan (Baum, 2017; Petek, 2021).

Permasalahan pengelolaan keuangan pendidikan yang sering muncul di lembaga pendidikan (Musolin et al., 2021). Peran keuangan dalam manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari fungsi lainnya karena akan mengakibatkan pengelolaan keuangan pendidikan akan berjalan tidak maksimal dan dapat menghambat proses pembelajaran dikarenakan dana pendidikan yang kurang. Oleh sebab itu, sekolah harus terus melakukan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, daerah ataupun dengan masyarakat atau wali murid untuk mendukung pendanaan sekolah (Solehan, 2022). Ketika dana pendidikan di terima oleh sekolah, maka sekolah harus mengelola dana tersebut dengan profesional dan transparan. Karena dana yang di dapat sekolah baik dari pemerintah ataupun masyarakat perlu dikelola dengan sangat hati-hati dan benar-benar dimanfaatkan untuk kependidikan pendidikan di sekolah karena dana tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang telah memberikan dana nya untuk sekolah.

Oleh sebab itu, seluruh *stakeholder* yang terdapat di sekolah utamanya kepala sekolah dan bendahara sekolah memiliki tanggungjawab yang sanagt besar terhadap pengelolaan pendidikan khususnya pemanfaatan dana pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai penganggungjawab segala yang terjadi di sekolah, harus dapat mendemokan kepada bendaha sekolah bagaimana cara mengelola dan memnafaatkan dana pendidikan di sekolah secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pemangku kepentingan di sekolah tersebut (Hastuti et al., 2018). Perbedaan cara pandang dan struktur pengelolaan yang ambigu secara tidak langsung akan membuat pengelolaan dana menjadi membingungkan, berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup pendidikan di sekolah.

Madrasah Ibtidaiyah atau SD Islam berlokasi di pedesaan, sedangkan sebagian besar dioperasikan oleh yayasan/lembaga swasta memiliki karakteristik sendiri dalam proses pembelajarannya dan pengelolaan pendidikannya termasuk pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang dilihat di MIS Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif lakukan untuk menjelaskan secara alamiah apa yang terjadi dengan pengelolaan pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, sedangkan studi kasus dilakukan untuk mempelajari dan menggali secara mendalam tentang model pengelolaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama wawancara kepada 1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 1 tenaga keuangan, 1 tenaga administrasi, 2 guru dan 2 siswa; kedua mengumpulkan dokumentasi terkait model pengelolaan

pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang; dan ketiga dengan mengobservasi seluruh kegiatan yang terkait dengan model pengelolaan pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang.

Teknik penglohana data pertama dengan reduksi data yang mana tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan fokus dalam penelitian ini yaitu perencanaan, penggunaan, pengawasan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan di di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang. Kedua penyajian data yaitu dengan menampilkan data berdasarkan fokus penelitian ke dalam bentuk tulisan dan tabel yang dapat memudahkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya. Ketiga penarikan kesimpulan, tahap ini dilakukan setelah data yang direduksi dan ditampilkan dalam bentuk kalimat yang singkat dan jelas kemudian penelitian melakukan penyimpulan data hingga mendapatkan data yang sesungguhnya berdasarkan fokus yang telah ditentukan.

Teknik keabsahan data pertama dengan triangulasi teknik yaitu peneliti berusaha mengkombinasikan hasil penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang tentang pengelolaan pembiayaan pendidikannya. Kedua dengan triangulasi sumber, yaitu peneliti mengkombinasikan hasil wawancara dari berbagai sumber atau informan yang telah ditentukan yaitu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru, tenaga kependidikan dan siswa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

Aspek Penelitian	Hasil Penelitian
Perencanaan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya penerimaan siswa baru 2. Biaya pengembangan pendidikan 3. Kontribusi masyarakat
Penggunaan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya insfrastruktur 2. Biaya gaji guru dan kependidikan 3. Biaya alat tulis kantor 4. Biaya operasinal madrasah
Pengawasan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Yayasan dengan memantau rekening madrasah 2. Pengawasan oleh kepala sekolah dengan memeriksa bukti pengeluaran, seperti tagihan, kwitansi, dan faktur.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan	Membuat laporan penerimaan dan penggunaan biaya pendidikan setiap semester yang dilaporkan kepada kepala sekolah dan Yayasan

Berdasarkan tabel 1 tentang hasil penelitian, maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan MIS Piladang

Renacana merupakan desain kerja yang akan dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan tugasnya di dalam organisasi yang mana rencana kerja tersebut dijadikan panduan bagi mereka untuk melaksanakan atau implementasi pekerjaannya (Baidowi, 2020). Tindakan awal dalam mengatur keuangan pendidikan di MIS Piladang adalah dengan menyusun visi dan misi sekolah serta menentukan besarnya dana yang harus digunakan. Biaya panitia yang harus diputuskan berlaku khusus untuk siswa baru. Karena madrasah menerapkan biaya kepanitiaan yang ditetapkan, biaya kepanitiaan siswa akan tetap sejak siswa mulai kelas I (satu) sampai ia menyelesaikan pendidikannya di kelas VI (enam). Biaya panitia dihitung dengan menggunakan biaya panitia tahun sebelumnya. Biaya komite (SPP) tidak ditentukan oleh persyaratan sekolah; pendapatan sekolah secara keseluruhan kemudian akan dihitung berdasarkan jumlah kontribusi komite yang telah disepakati. Berikutnya dengan dapat dilakukan dengan pengembangan dan menentukan program kerja yang akan dilaukan serta diselesaikan di masa depan tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan (4) Alokasi anggaran berdasarkan kegiatan. Setelah tujuan dan program kegiatan ditentukan, alokasi keuangan untuk setiap kegiatan ditetapkan berdasarkan jumlah kontribusi panitia.

MIS Piladang sebagai Lembaga swasta dan mendapatkan dana pendidikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah agar proses pembiayaan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sekolah. Selain itu, sumber pembiayaan MI Piladang antara lain: pertama, dana dari Penerimaan Siswa Baru yang dijadikan sumber pendapatan sekolah dari biaya pendaftaran yang dikeluarkan oleh calon siswa baru. Siswa yang mendaftar setelah batas waktu tersebut akan dikenakan biaya pendaftaran. MIS Piladang telah memberlakukan persyaratan bagi siswa yang mendaftar, yaitu apabila siswa mendaftar sebelum hari yang telah ditentukan maka siswa tidak dimintai uang pendaftaran, dan apa bila calon siswa mendaftar melewati tanggal yang telah ditentukan, maka calon siswa akan dikenakan uang pendaftara. Kebijakan sistem penerimaan siswa baru tersebut dilakukan agar sekolah mendapatkan siswa baru yang banyak. Adapun alur dalam pendaftaran siswa baru di MI Piladang adalah: calon siswa mendaftar, melakukan pencetakan kartu pendaftaran, mengurutkan calon siswa sesuai rengking, dan menetapkan siswa yang akan diterima (Sarwindah, 2018)

Kedua Kontribusi Pengembangan Pendidikan, Jumlah biaya sekolah yang harus dibayar orang tua untuk anak-anak mereka bervariasi berdasarkan tingkat kelas. Harga kuliah tetap siswa tidak akan berubah sampai siswa menyelesaikan studinya. Jika ada perubahan biaya, itu hanya mempengaruhi siswa baru. Hal

tersebut dilakukan agar orang tua mempercayai sekolah terkait dengan biaya pengelolaan pendidikan di sekolah. Dengan hal ini, diyakini beban wali murid akan berkurang. Dana pengembangan pendidikan digunakan untuk pembangunan gedung, pengadaan peralatan atau perawatan, perpindahan siswa kelas VI, perbaikan pintu pagar dan lain sebagainya (Andriani & Mahani, 2019).

Ketiga Kontribusi masyarakat dilakukan secara sukarela, sumbangan sukarela dari masyarakat merupakan sumbangan yang bersifat jujur, sukarela, dan tidak mengikat, dan biasanya dalam bentuk infak. Sumbangan sukarela donor tidak selalu berupa uang. Para donatur juga memberikan sumbangan sukarela dalam bentuk barang, seperti peralatan inventaris kantor, peralatan olah raga, dan pembangunan gedung sekolah. Sedangkan sumbangan yang di dapat secara sukarela, dana tersebut tidak dimasukkan pada buku keuangan sekolah, namun dimasukkan pada buku hibah yang sekolah kelola secara berbeda. Bantuan hibah yang di terima sekolah berupa uang dan barang yang diberikan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah seperti memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, membeli medi pembelajaran dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah atau Lembaga pendidikan seharus bekerjasama agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas sistem pendidikan agar proses pemebelajaran dapat berjalan dengan baik di sekolah (Normina, 2016).

2. Penggunaan Dana Pendidikan MIS Piladang

Pelaksanaan rencana pembiayaan, dalam konteks ini, meliputi penggunaan uang berdasarkan anggaran tertentu setelah rencana penggunaan dana pendidikan telah selesaidisusun dan kemudian diserahkan kepada Yayasan dan komite sekolah. Sedangkan bendahara sekolah mencata semua penerimaan dan pengeluaran dana yang didapatkan melalui SPP siswa ke dalam buku harian keuangan yang kemudian dipindah ke dalam buku catatan iuran siswa (SPP) berdasarkan angkatannya. Dan semua penerimaan dan penggunaan dana pendidikan di MI Piladang di catat dalam buku kas umum sekolah pada buku uang masuk dan keluar.

Pemanfaatan keuangan madrasah didokumentasikan dan diklasifikasikan sebagai biaya madrasah seperti Instruktur yang berkualitas tidak dapat dibayar menggunakan dana BOS, biaya kepanitiaan (SPP) sering digunakan untuk membayar gaji guru. Selanjutnya, pembayaran SPP digunakan untuk mendukung biaya tambahan yang harus dilakukan sebelum uang BOS dikeluarkan. Penggunaan biaya pendidikan di sekolah dapat digunakan untuk mengembangkan kebutuhan perpustakaan, kepentingan penerimaan siswa baru, pengembangan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengelolaan pendidikan di sekolah, langganan daya dan jasa, memelihara perabotan dan peralatan pendidikan serta honor guru dan kependidikan (Baidowi et al, 2018).

Penggunaan uang seringkali tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RAPBM. Disparitas tersebut salah satunya disebabkan karena masih banyaknya siswa yang belum membayar iuran kepanitiaan (SPP). Akibatnya, dana yang diperoleh selama periode itu digunakan untuk honor pendidik, kependidikan serta tunjangan-tunjangan lain yang ada di sekolah serta untuk alat tulis kantor saja. Selain itu, dana yang dimiliki sekolah pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan dikarenakan jumlah uang yang dikumpulkan melalui SPP siswa tidak mampu mencukupi kebutuhan yang terdapat pada RAPBM. Sehingga jika orang tua siswa membayar tunggakan yang ada, maka uang tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar honor tenaga pendidik dan kependidikan yang belum terbayarkan sebelumnya

3. Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di MIS Piladang

Pengawasan pada pemanfaat dana pendidikan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui berapa jumlah penggunaan atau pemanfaatan uang untuk kebutuhan sekolah dan apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada rencana penggunaan dana sekolah yang disusun sebelumnya. Pengawasan dikatakan sebagai aktivitas manajemen sekolah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketidaksesuaian rencana dengan realisasi rencana dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja sekolah secara berkelanjutan (Baidowi & Syamsudin, 2022).

Pengawasan yang dilakukan pada dana sekolah (uang sekolah) yang telah diterima dan digunakan oleh sekolah dilakukan oleh ayayasan dan panitia pengawas sekolah minimal setiap 6 bulan sekali. pengawasan dilakukan dengan memeriksa buku kas umum sekolah atau buku uang masuk dan keluar yang dimiliki sekolah. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa segala bukti penggunaan dana sekolah dengan memeriksa laporan penggunaan keuangan yang terdiri dari kwitansi dan nota. Pengawas Yayasan dan komite jarang melakukan pemantauan terhadap rekenik sekolah dan pihak Yayasan memeriksa rekenik tersebut jika hanya terdapat masalah di sekolah. Dalam praktiknya, rata-rata pengawas dalam melakukan evaluasi hanya fokus pada bukti fisik dan perkembangan sekolah. Selama sistem pembelajaran berjalan dengan baik, maka diasumsikan bahwa semua proses manajemen juga berjalan lancar. Pengawasan adalah upaya melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Atmodiwiryo, Satriadi, 2015).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan di MIS Piladang

Pelaporan dan pertanggungjawab keuangan pendidikan di MIS Piladang adalah bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dikerjakan oleh bendahara sekolah. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan sekolah berisikan tentang kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana sekolah dengan

RAPBM sekolah. Dengan adanya laporan tersebut, kepala sekolah dan Yayasan dapat menilai kondisi keuangan di sekolah pada saat ini. Laporan keuangan adalah Riwayat penggunaan keuangan organisasi yang digunakan untuk mengathui sejauh mana kekayaan dimiliki organisasi saat ini yang terangkum dalam bentuk neraca dan laporan untung rugi organisasi yang dilaporkan kepada tingkat manajemen, tingkat pihak eksternal organisasi serta pada pihak-pihak khusus yang telah memberikan dananya dalam organisasi (Riswan, 2014).

Adapun cara yang dilakukan oleh bendahara sekolah untuk membuat laporan penggunaan keuangan pendidikan di sekolah kepada pihak-pihak yang berwenang adalah: pertama bendahara membuat rekapitulasi penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah sesuai dengan RAPBM yang dilakukan di setiap akhir semester. Kedua, bendahara merinci penerimaan dan penggunaan dana sekolah ke dalam laporan kuangan selama 6 bulan terakhir dengan melampirkan kwitansi, nota dan bukti pendukung lain seperti foto. Ketiga, laporan yang telah disusun kemudian ditandatangani oleh pihak kepala sekolah. Laporan keuangan yang disusun oleh bendahara dapat dilakukan dengan membuat buku harias kas sekolah, buku pengontrol penggunaan keuangan sekolah yang dilaporkan kepada kepala sekolah dan pihak yang berkepentingan lainnya pada saat rapat sekolah baik rapat bulana, semester ataupun tahunan (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Setelah laporan keuangan disusun dan dilaporkan kepada kepala sekolah, laporan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh Yayasan dan panitia Yayasan untuk menilai apakah penggunaan dana sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan yang manaleporan tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk merencanakan penggunaan keuangan berikutnya. Organisasi wajib melakukan penilaian terhadap laporan keuangan yang ada, tujuannya agar organisasi dapat menilai kinerja keuangannya yang dapat digunakan untuk membandingkan kondisi keuangan setiap tahunnya baik di tahun aat ini ataupun tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di organisasi (Ariyanti, 2020). Manfaat dari adanya laporan keuangan organisasi adalah untuk mengetahui posisi keuangan dan kekayaan organisasi dalam periode tertentu, untuk mengetahui kekurangan pada pengelolaan keuangan organisasi, untuk menentukan startegi perbaikan organisasi melalui kondisi keuangan organisasi, menilai kinerja organisasi secara keseluruhan apakah perlu adanya penyegaran terhadap pengelolaan keuangan organisasi atau tidak (Rahmat & Komariah, 2016).

D. SIMPULAN

Berdasarkan literature dan kajian di MIS Piladang tentang model dan pola pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa (1) Pada MIS Piladang, perencanaan pembiayaan pendidikan masih dalam penyesuaian dengan

kebutuhan belajar siswa, dan prinsip perhitungan biaya satuan belum diterapkan secara keseluruhan; biaya pendidikan hanya ditentukan berdasarkan kesungguhan wali murid dalam musyawarah, sehingga alokasi biaya setiap komponen dalam rencana pembiayaan pendidikan disusun/diperhitungkan berdasarkan jumlah dana yang terkumpul; (2) Dana pendidikan digunakan untuk uang yang berasal dari biaya komite untuk mendukung komponen yang tidak dapat dibiayai dengan dana BOS. Pembukuan masih terbilang mendasar; (3) Setiap enam bulan, yayasan, panitia, dan pengajar mengawasi penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari iuran panitia (per semester). Mayoritas pengawasan hanya terfokus pada kondisi fisik dan pertumbuhan madrasah serta (4) Laporan pertanggungjawaban dibuat dengan cara meringkas seluruh penerimaan dan pengeluaran selama enam bulan sebelumnya serta melampirkan semua tagihan, kwitansi, dan bukti transaksi atas pengeluaran yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, A. F. Al, Julaiha, S., & Dzuhri, M. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan Islam; Historis, Pengertian, Fungsi, Dan Sumber. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 6.
- Andriani, & Mahani Mokhtar. (2019). Pelaksanaa Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Makassar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 69-85. Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/view/12140>
- Ariyanti, K. (2020). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 06(02), 218-226.
- Baidowi, A. (2020). Implementasi Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Program Bantuan Operasional PAUD di Masa Pandemi Covid-19. *GENIUS: Indonesian Journal of Early Childhood Education*, 1(2), 141-157. <https://doi.org/10.35719/gns.v1i2.23>
- Baidowi, A., & Aulia Widyaningsih, R. (2022). Pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Kelompok Bermain Nur-Masithah Sampang Madura. *Al Tahdzib: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.54150/altahdzib.v1i1.68>
- Baidowi, A., & Syamsudin, S. (2022). Strategi Supervisi Pendidikan di Sekolah. *Alim / Journal of Islamic Education*, 4(1), 27-38. <https://doi.org/10.51275/alim.v4n1.27-38>
- Baidowi, A., Roesminingsih, M. V., & Soedjarwo, S. (2018). The Implementation of School Operational Assistance Program Policy at Primary School Levels. *Proceedings of the 2nd International Conference on Education Innovation*

- (ICEI 2018), 212, 298-305, doi: 10.2991/icei-18.2018.66
- Baum, S. (2017). State higher education financing. *Public Funding of Higher Education: Changing Contexts and New Rationales*, 79–107. https://www.mhec.org/sites/default/files/resources/mhec_affordability_series1_20170301.pdf
- Ferdi. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Hastuti, M., Yamin, M., & Hakim, L. (2018). Manajemen Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur. *Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies*, 18(2), 131–148. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v18i2.45>
- Musolin, M., Khoirun Nisa', & Laelatul Mudmiroh. (2021). Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 147–166. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.175>
- Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(26), 71-85.
- Petek, G. (2021). Overview of Special Education Funding Models. *Legislative Analyst's Office -An Lao Report*, 1–8. www.lao.ca.gov
- Pusvitasari, R. & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo). *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(01), 94-106
- Rahmah, M. N. & Komariah, E. (2016). Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI (Studi Kasus PT Indocement Tunggul Prakarsa TBK). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 01(01), 43-58
- Riswan. (2014). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 05(01), 93-121.
- Safriadi. (2016). Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah. *Al -'Ibrah*, 4(2), 69–93. <http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/14>
- Sarwindah. (2018). Sistem Pendaftaran Siswa Baru Pada SMP N 1 Kelapa Berbasis Web. *Jurnal SISFOKOM*, 07(02), 110-115.
- Satriadi. (2015). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri Binaan Tanjungpinang. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education*, 04(02), 288-295.
- Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu

Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.

Yunita, Y., Bakar, A., & Karim, N. (2022). Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Sudan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 64–76. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.426>